

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar serta berhak atas perlindungan dari tindakan kejahatan, kekerasan, eksploitasi maupun bekerja pada pekerjaan yang mengganggu pendidikan, fisik, mental dan perkembangan sosial anak. Namun pada kenyataannya, perlindungan terhadap hak-hak anak masih terbilang rendah (www.kompas.com, 2012). Kurangnya perhatian terhadap hak-hak anak membuat anak-anak di dunia saat ini rentan terjerumus ke dalam kegiatan prostitusi. Banyak anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual (Octalina, 2014: 5).

World Tourism Organization (WTO) melaporkan bahwa lebih dari satu juta anak di seluruh dunia dilibatkan dalam kegiatan prostitusi di industri pariwisata (www.aids-ina.org, 2010). Dari tahun ke tahun pemanfaatan prostitusi anak dalam industri pariwisata semakin mengalami peningkatan. Namun masalah ini belum mendapat perhatian lebih oleh para penyelenggara bisnis pariwisata baik oleh pemerintah maupun swasta karena dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya kunjungan wisatawan asing (Sisavath, 2011: 29).

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara kebanyakan merupakan destinasi wisata favorit wisatawan karena memiliki keindahan alam yang mengagumkan dan budaya yang sangat beragam. Namun, dibalik itu semua terdapat fakta yang memprihatinkan bahwa setiap tahunnya, lebih dari 225.000 orang diperdagangkan

melintasi batas internasional ke dalam kondisi kerja paksa dan eksploitasi seksual di Asia Tenggara (Overs, 2013: 1). Fenomena perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak sudah lama berkembang di banyak negara di dunia, khususnya negara kawasan Asia Tenggara yang sering menjadi target eksploitasi anak untuk seks komersial terbesar di dunia seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja dan Indonesia (ECPAT Internasional, 2008: 10).

Negara di kawasan Asia Tenggara sudah lama menjadi incaran para wisatawan seks anak. Thailand dan Filipina sering disebut-sebut sebagai ‘surganya pariwisata seks anak’ karena perkembangan pariwisata seksnya yang luar biasa. Namun mulai tahun-tahun terakhir ini Pemerintah Thailand dan Filipina sedang gencar-gencarnya meningkatkan upaya untuk memerangi pariwisata seks anak di masing-masing negaranya. Sebagai dampaknya, pariwisata seks anak kemudian bergeser ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam dan Indonesia. Negara-negara tersebut kemudian muncul sebagai tujuan pariwisata seks anak yang paling utama (ECPAT Internasional, 2008: 10).

Penelitian ini mengambil kasus perdagangan seks anak di Kamboja. Hal ini dikarenakan Kamboja telah lama menjadi tujuan bagi wisatawan seks pria asal Asia dan negara-negara barat – namun semakin merajalela akibat dampak dari Pemerintah Thailand dan Filipina yang sedang gencar memerangi *sex tourism* di masing-masing negaranya (ECPAT Internasional, 2008: 20). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian Kamboja (Phnom Penh Securities Firm, 2013: 1). Dari tahun 2003 sampai 2015, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kamboja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat

Tabel 1.1). Jumlah wisatawan asing yang datang ke Kamboja mengalami peningkatan dua kali lipat selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, sekitar 4,7 juta wisatawan asing mengunjungi Kamboja (Statistics and Tourism Information Department, 2015: 2) yang tertarik dengan kuil-kuil Angkor, keeksotisan pantai-pantai tropis dan beberapa dari para wisatawan tertarik dengan ‘pelacuran’ yang tergolong murah (www.dandc.eu, 2015).

Tabel 1.1

Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing di Kamboja (1993-2015)

International Tourist Arrivals, Average Length of Stays, Hotel Occupancy & Tourism Receipts 1993 - 2015					
Years	Int'l Tourist Arrivals		Average Length	Hotel Occupancy	Tourism Receipts
	Number	Change (%)	of Stays (Days)	(%)	(Million US\$)
1993	118,183	-	N/A	N/A	N/A
1994	176,617	49.4	N/A	N/A	N/A
1995	219,680	24.4	8.00	37.0	100
1996	260,489	18.6	7.50	40.0	118
1997	218,843	-16.0	6.40	30.0	103
1998	286,524	30.9	5.20	40.0	166
1999	367,743	28.3	5.50	44.0	190
2000	466,365	26.8	5.50	45.0	228
2001	604,919	29.7	5.50	48.0	304
2002	786,524	30.0	5.80	50.0	379
2003	701,014	-10.9	5.50	50.0	347
2004	1,055,202	50.5	6.30	52.0	578
2005	1,421,615	34.7	6.30	52.0	832
2006	1,700,041	19.6	6.50	54.8	1,049
2007	2,015,128	18.5	6.50	54.8	1,400
2008	2,125,465	5.5	6.65	62.7	1,595
2009	2,161,577	1.7	6.45	63.6	1,561
2010	2,508,289	16.0	6.45	65.7	1,786
2011	2,881,862	14.9	6.50	66.2	1,912
2012	3,584,307	24.4	6.30	68.5	2,210
2013	4,210,165	17.5	6.75	69.5	2,547
2014	4,502,775	7.0	6.50	67.6	2,736
2015	4,775,231	6.1	6.80	70.2	3,012

Sumber data: *Statistics and Tourism Information Department in Cambodia 2015*

Prostitusi di Kamboja memang terkenal sangat murah, harga nya jauh lebih rendah dibandingkan di Thailand yang notabene merupakan salah satu tujuan wisata seks paling terkenal di dunia. Dikatakan bahwa para pekerja seks komersial di Kamboja menjual diri mereka seharga US\$ 5 – meskipun wisatawan Barat lebih

sering membayar mereka setidaknya sebesar US\$ 20 - US\$ 30 (www.dandc.eu, 2015).

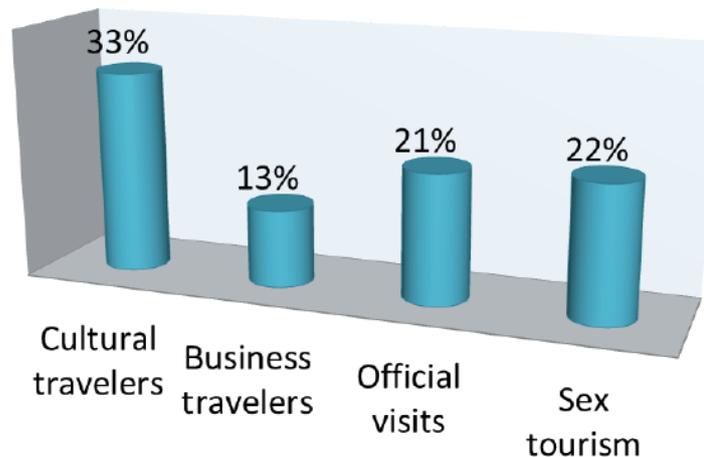
Kamboja merupakan negara asal, transit dan tujuan bagi wanita, pria dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa (www.state.gov, 2015). Setelah bertahun-tahun berhadapan dengan konflik dan perang, Kamboja perlahan-lahan mulai bangkit dan memperbaiki perekonomiannya. Kondisi perekonomian Kamboja terus memperlihatkan kemajuan yang signifikan khususnya di empat sektor utama yakni sektor pariwisata, konstruksi, agrikultur dan industri garmen (www.economywatch.com, 2010). Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang menunjang kemajuan ekonomi Kamboja. Pada tahun 2008 tercatat bahwa sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan nasional Kamboja yakni sebesar US\$ 820 juta atau sebanyak 9% dari GDP Kamboja tahun 2008 (Chheang, 2009: 14).

Tahun 2012, pertumbuhan pada sektor pariwisata ini mencapai 15% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Seiring dengan Pemerintah Kamboja yang mencanangkan rencana strategis tahun 2012-2020 dalam rangka melanjutkan dukungan yang kuat pada industri pariwisata, sektor ini diperkirakan akan semakin tumbuh dengan signifikan di tahun-tahun yang akan datang (Phnom Penh Securities Firm Plc, 2013: 2). Namun, semakin berkembangnya industri pariwisata di Kamboja, negara ini nampaknya harus menghadapi tantangan baru berupa pertumbuhan industri pariwisata seks sebagai dampak negatif dari aspek pariwisata.

Menurut laporan dari World Vision tahun 2002, wisatawan yang datang ke Kamboja, sebanyak 65% adalah laki-laki. Seperlima dari mereka berkunjung ke Kamboja adalah untuk berhubungan seks. Para *sex tourist* ini kebanyakan berasal dari Thailand, Tiongkok, Jepang, Australia, Swiss, Perancis, Amerika Serikat dan Inggris (Batstone, 2007: 60). Dan berikut ini menurut data dari World Vision Cambodia, ada beberapa alasan mengapa para wisatawan asing berpergian ke Kamboja.

Grafik 1.1

Alasan Wisatawan Asing Berkunjung ke Kamboja



Sumber data: Tuovinen, 2014: 34

Dari grafik di atas bisa kita lihat bahwa sebanyak 22% turis yang berkunjung ke Kamboja, tujuannya adalah untuk *sex tourism*. Itu berarti *sex tourism*

di Kamboja telah menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke negara tersebut.

Beberapa bisnis seks sebagai daya tarik wisatawan telah tersebar di berbagai penjuru ibukota Kamboja, Phnom Penh. Salah satu kawasan yang paling terkenal terkait dengan wisata seks nya yaitu kawasan Svay Pak atau yang kerap kali dikenal dengan sebutan kilometer 11. Svay Pak juga dikenal sebagai pusat pekerja seks anak baik yang berasal dari Kamboja maupun pekerja seks anak asal Vietnam. Kawasan ini seperti surga bagi para kaum pedofil (www.edition.cnn.com, 2013).

Sihanoukville juga merupakan nama kawasan di Kamboja yang juga terkenal dengan pariwisata seks nya. Para wisatawan dapat menikmati pantai yang indah, suasana tenang dan pemandangan yang mengagumkan di kawasan tersebut. Namun semakin beranjak malam, aktivitas yang terlihat hanya seputar seks dan seks, sehingga tempat ini dikenal dengan julukan 3S yakni *Surf, Sun and Sex* (Epic Asia Travel, 2010). Anak-anak di bawah umur juga banyak yang masuk ke dunia prostitusi di kawasan ini. Selain Phnom Penh dan Sihanoukville, destinasi utama pariwisata seks lainnya di Kamboja yakni Siem Reap, Battambang dan Banteay Manchev (Tuovinen, 2014: 34).

Semakin berkembangnya industri pariwisata seks anak di Kamboja dan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung dengan tujuan *sex tourism* di Kamboja, kemudian mendorong penulis untuk memilih negara tersebut dalam penelitian ini. Perdagangan seks yang melibatkan anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut hak asasi

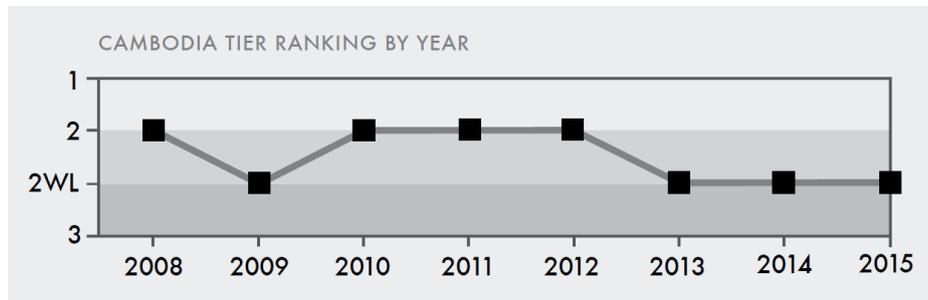
manusia (Akbar, 2012: 68). Setiap anak di dunia mempunyai hak untuk bebas dan aman dari segala bentuk eksploitasi seksual.

U.S. Department of State setiap tahunnya merilis laporan yang mengkategorikan negara-negara ke dalam *tier* (tingkatan) berdasarkan pada sejauh mana upaya pemerintah untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan manusia¹ (U.S. Department of State, 2015: 45). Berdasarkan grafik 1.3, Kamboja mengalami penurunan status *tier* di tahun 2013-2015. Kamboja ditempatkan pada *tier 2 Watch List* untuk tiga tahun terakhir berturut-turut. Pemerintah Kamboja masih terus menghadapi pekerjaan rumah tentang kasus perdagangan manusia khususnya yang melibatkan anak. UNICEF memperkirakan bahwa sepertiga dari 100.000 pekerja seks di Kamboja adalah anak-anak (www.finance.detik.com, 2013).

¹ *Tier 1* merupakan tingkatan bagi negara-negara yang pemerintahannya sudah memenuhi standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA). Kemudian *tier 2* yaitu tingkatan bagi negara-negara yang pemerintahannya belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, namun telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk memenuhi standar. Sedangkan *tier 2 Watch List* merupakan tingkatan dari negara-negara dengan kondisi dimana angka korban perdagangan manusia meningkat secara signifikan, gagal memberikan bukti dalam peningkatan upaya-upaya untuk memerangi perdagangan manusia, dan ada ketetapan dari negara untuk meningkatkan upaya tersebut di tahun yang akan datang agar dapat memenuhi standar minimum TVPA. Yang terakhir adalah negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi perdagangan manusia ditempatkan di *tier 3*.

Grafik 1.2

Peringkat Tier Kamboja Tahun 2008-2015



Sumber: *U.S. Department of State, Trafficking in Person Report (2015: 110)*

Kajian mengenai peranan organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan di Kamboja tersebut menjadi penting mengingat hubungan internasional kontemporer tidak dapat mengesampingkan peran aktor non-negara, seperti *non-government organization* (NGO). Hal tersebut mendorong penulis untuk memilih organisasi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) untuk dibahas dalam penelitian ini.

Saat ini, ECPAT telah beroperasi di lebih dari 86 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk memerangi ESKA. Dalam menjalankan programnya, ECPAT bekerjasama dengan pemerintah setempat, organisasi internasional, aparat penegak hukum dan berbagai pihak yang *concern* terhadap permasalahan ESKA (www.ecpat.org, 2016).

Semenjak beroperasi di Kamboja pada tahun 1995, ECPAT banyak bekerjasama dengan organisasi internasional, kementerian, badan-badan PBB, NGO, kedutaan asing dan aktor-aktor lain untuk memerangi semua permasalahan

yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak. Selain itu, ECPAT dan Pemerintah Kamboja bekerjasama dengan sejumlah organisasi hak-hak anak dan instansi pemerintah mengadakan kampanye “Anti Perdagangan Anak” yang diselenggarakan pada 12 Desember 2006. ECPAT juga mengadakan lokakarya untuk orang-orang yang bekerja di industri pariwisata – seperti pemilik hotel, *guest house* dan agen-agen *tour travel* agar tidak terlibat dalam segala tindakan yang mengarah pada ESKA. Kemudian ECPAT membantu Pemerintah Kamboja mengembangkan Rencana Aksi Nasional menangani eksploitasi seksual anak (ECPAT Internasional, 2011: 15-16).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ECPAT telah berupaya menangani masalah perdagangan seks anak di Kamboja dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, jumlah anak yang diperdagangkan untuk memenuhi permintaan industri pariwisata seks di Kamboja masih terus berkembang dan banyak dari kasus tersebut yang masih belum terungkap (Schyst Resande, 2013: 25).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ECPAT dalam menangani perdagangan seks anak yang berkembang di Kamboja?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui fenomena kejahatan perdagangan seks anak yang terjadi di Kamboja;
- Untuk mengetahui kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja;
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan membuka kesadaran bagi para pembaca tentang pentingnya isu perdagangan seks anak;
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang tertarik mengkaji masalah perdagangan seks anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Perdagangan Seks Anak sebagai Sebuah Kejahatan

Perdagangan manusia terutama bagi anak di bawah umur, bukan merupakan masalah yang baru bagi negara-negara di dunia. Praktik perdagangan seks anak telah melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan dan menghadapkan anak-anak pada ancaman fisik seperti infeksi penyakit seksual menular. Perdagangan seks anak yang terjadi di belahan dunia telah mengancam eksistensi dan martabat

kemanusiaan yang membahayakan masa depan anak (Fahmi, 2013: 123). Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang disengaja yang menimbulkan kerugian bagi anak-anak, baik secara fisik maupun emosional.

Di mata hukum, pengertian kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana, dimana mengandung unsur-unsur diantaranya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada maksud jahat atau niat jahat, ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat, ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan, dan yang terakhir harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut (Alam, 2010:17).

Perdagangan seks anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dianggap sebagai pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dalam prosesnya juga terjadi pelanggaran terhadap martabat dan fisik atas manusia, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi manusia, serta adanya diskriminasi terhadap manusia yang diperdagangkan tersebut (ECPAT Internasional, 2009: 56). Perdagangan seks anak telah meluas baik dalam bentuk kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Hal ini kemudian menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia (Akbar, 2012: 68).

Perdagangan seks anak bukan hanya mengenai praktek kejahatan internasional yang memindahkan anak sebagai komoditas dari satu negara ke

negara lain, namun juga menyangkut praktek jual beli di lingkup domestik negara itu sendiri. Selain banyak korban yang di perdagangkan melintasi batas internasional, banyak juga korban yang mengalami *trafficking* domestik, misalnya dari kota ke kota, antar provinsi di dalam negeri (Rodriguez & Hill, 2011: 1).

1.5.2 Penanganan Perdagangan Seks Anak dengan Pendekatan Liberalisme

Pada awalnya disiplin Hubungan Internasional (HI) hanya terfokus pada negara sebagai unit analisis. Hubungan internasional hanya memiliki satu aktor tunggal yang sangat dominan yaitu negara. Namun dalam perkembangannya, disiplin HI juga melirik kekuatan-kekuatan di luar negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional merupakan suatu kajian yang mempelajari interaksi di antara aktor-aktor dalam politik internasional, misalnya negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan para individu (Mingst, 1999: 2).

Liberalisme merupakan salah satu perspektif tradisional dalam studi hubungan internasional. Dalam perspektif liberalisme dinyatakan bahwa negara bukan merupakan satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional, aktor non-negara juga merupakan aktor tak kalah penting. Menurut pandangan liberalisme, organisasi internasional memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia (Henderson, 1998: 74). Hal ini semakin menguatkan argumentasi kaum liberalis bahwa aktor non-negara juga memiliki peranan penting dalam hubungan internasional.

Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen (2013: 173) dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, kaum liberalis mempunyai asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: (1) memiliki pandangan positif tentang sifat manusia; (2) memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual; dan (3) percaya terhadap kemajuan.

Liberalisme memiliki agenda utama yakni menciptakan perdamaian dan kerjasama yang baik antara aktor negara maupun aktor non-negara. Kaum liberal memiliki pandangan positif tentang manusia. Mereka memiliki keyakinan yang besar terhadap akal pikiran manusia dan yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat digunakan pada isu-isu internasional. Kaum liberal percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan, namun dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, yang membawa manfaat yang besar bagi banyak orang (Jackson & Sorensen, 2013: 175).

Berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme selalu mengedepankan proses kerjasama antar aktor (negara atau non-negara) dalam proses pemenuhan kebutuhan tiap negara. Sama seperti manusia yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tetap *survive*, setiap negara juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian diperlukan aktor lain untuk menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara.

Meskipun negara telah melakukan beberapa hal untuk mengatasi perdagangan seks anak ini, namun kurang efektifnya program dari pemerintah dan

lemahnya penegakan hukum, membuat kejahatan tersebut semakin merajalela dan memakan lebih banyak korban lagi. Disinilah kemudian peranan masyarakat, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan juga aktor-aktor individual lainnya sangatlah dibutuhkan untuk memerangi kejahatan perdagangan seks anak tersebut, karena negara tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian (Adhinata, 2012: 12).

Terlihat jelas bahwa kejahatan perdagangan seks anak ini mendapat urgensi internasional karena keberadaannya dapat mengancam hak asasi manusia, sehingga harus segera diatasi. Dalam kasus perdagangan seks anak, diperlukan kerjasama dari berbagai macam aktor atau semua pihak yang terkait – tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, untuk memberantas kejahatan perdagangan seks anak yang sudah sangat memprihatinkan ini.

1.5.3 Organisasi Internasional

Pada awalnya disiplin Hubungan Internasional (HI) hanya terfokus pada negara sebagai unit analisis. Hubungan internasional hanya memiliki satu aktor tunggal yang sangat dominan yaitu negara. Namun dalam perkembangannya, disiplin HI juga melihat kekuatan-kekuatan lain di luar negara sebagai aktor dalam hubungan internasional dan turut berperan dalam interaksi global. Seperti contohnya yakni organisasi internasional.

Menurut Jack. C Plano (1979: 319), organisasi internasional merupakan suatu pengaturan formal yang melintasi batas wilayah nasional yang menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna dapat memudahkan

kerjasama diantara anggota-anggotanya dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa organisasi internasional memiliki peran penting yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Organisasi-organisasi yang ada selama ini telah berperan aktif dalam menciptakan keadaan yang lebih baik dan damai di dunia. Karena organisasi internasional mampu melampaui wilayah negara-negara di dunia, maka organisasi internasional bisa menjadi alat yang mumpuni untuk dapat berperan sebagai pihak ketiga dalam melihat suatu fenomena yang ada. Organisasi internasional mempunyai kekuatan untuk mendukung negara-negara dalam menyalurkan kepentingan mereka yang melalui batas-batas wilayah nasional sehingga negara dapat berfungsi lebih baik (Plano & Riggs, 1986: 271).

Adapun beberapa kriteria utama dalam membentuk suatu organisasi internasional (Feld, Jordan dan Hurwitz, 1992: 10) antara lain, yang pertama yaitu tujuan dan maksud yang ingin dicapai merefleksikan adanya kesamaan kepentingan dari masing-masing anggotanya. Kedua, pencapaian tujuan tersebut mencerminkan adanya keterlibatan dari setiap negara anggota. Yang ketiga, adanya suatu kerangka institusional yang bersifat permanen, yang ditandai dengan adanya staf dan sekretariat tetap. Keempat, organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral internasional yang didasarkan pada perjanjian internasional yang mengikat masing-masing anggotanya dan kriteria yang terakhir yakni organisasi internasional wajib memiliki karakteristik yang sesuai dengan hukum internasional.

Setiap organisasi internasional dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional. Menurut Harold K. Jacobson (1979: 88-90), ada 5 (lima) fungsi dari organisasi internasional diantaranya yaitu, pertama adalah fungsi informasi yang berkenaan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya kemudian mengadakan pertukaran data, menyebarkan data, serta menginformasikan sudut pandangnya. Kedua ada fungsi normatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik yang berupa deklarasi ataupun pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia.

Ketiga, fungsi pembuatan peraturan yakni fungsi ini berkaitan dengan peranan organisasi internasional untuk membuat sebuah peraturan baru atau mengupayakan agar peraturan, perjanjian yang telah disepakati, ditandatangani dan diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional. Kemudian yang terakhir adalah fungsi operasional. Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian semua sumber daya yang ada pada organisasi internasional untuk mencapai tujuan. Pemanfaatan dan pengoperasian sumber daya bisa berupa pendanaan dan pengoperasian sub organisasi (Jacobson, 1979: 88-90).

Organisasi internasional memiliki peranan penting dalam memecahkan masalah internasional ketika suatu negara tidak mampu menangani masalah yang

berdimensi nasional ataupun internasional. Kemudian organisasi internasional muncul menjadi pihak ketiga yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan tersebut (Perwita, 2005: 95).

Clive Archer (1983: 136-137) menjelaskan ada tiga peran organisasi internasional, antara lain: (1) sebagai instrumen, yakni organisasi internasional digunakan oleh negara-negara sebagai kesempatan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, atau suatu organisasi dan negara; (2) sebagai arena atau forum, yaitu organisasi internasional digunakan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan, negosiasi, diskusi, berdebat, bekerjasama antar negara, serta pembuat keputusan secara bersama-sama atau perjanjian internasional; (3) sebagai aktor independen, organisasi internasional memiliki posisi yang netral dalam menangani suatu masalah. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan lain dari luar organisasi – misalnya negara, meskipun pada dasarnya organisasi internasional dibentuk oleh kesepakatan negara-negara.

Dalam kasus perdagangan seks anak, organisasi internasional diharapkan dapat memproyeksikan fungsinya dan melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik itu kerjasama antar pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah.

1.5.4 Kinerja Organisasi

Rue & Byars (dalam Keban, 1995: 43) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*degree of accomplishment*” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Definisi lain menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai etika (Prawirosentana, 1999: 1).

Kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001: 329). Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama di antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja organisasi terdiri dari: (a) hasil-hasil atau evaluasi fungsi pekerjaan; (b) pencapaian tujuan organisasi; dan (c) periode waktu tertentu.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dapat diketahui dengan menggunakan penilaian kegiatan organisasi tersebut. Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam rentang waktu tertentu.

Selain itu penilaian kinerja organisasi sangat diperlukan karena untuk memudahkan perencanaan agar lebih terperinci lagi sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai dan juga dapat meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari karena semua tindakan yang akan dilakukan sudah dibuat suatu pedoman untuk melaksanakan suatu program yang akan dilaksanakan (Tatikonda, 1998: 67). Penilaian tersebut juga dapat menjadi *input* untuk perbaikan dan peningkatan kualitas organisasi.

Berhasil atau tidaknya tujuan dan cita-cita dalam sebuah organisasi tergantung pada bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Untuk mengetahui kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja, digunakan indikator kinerja organisasi dari Jenny Larsson dan Joan Kinnunen (2008: 18-20), yakni *inputs*, *outputs*, *outcomes* dan *impact*.

Inputs didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan misi atau proyek tertentu, seperti *staff*, relawan, modal fisik, material, pendapatan, dll. Indikator yang kedua adalah *outputs* yang didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diberikan. Contohnya adalah jumlah orang yang menghadiri lokakarya atau kelas pelatihan dan jumlah *shelter* yang disediakan. Ketiga adalah *outcomes*, *outcomes* atau hasil sangat erat kaitannya dengan misi organisasi. Mengukur hasil dan mengevaluasi efektivitas memungkinkan untuk melihat seberapa jauh tingkatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Terakhir ada *impact* yang mengacu pada perubahan yang merupakan hasil dari kegiatan organisasi. Dampak bisa berupa dampak jangka panjang atau jangka pendek, serta dampak positif maupun negatif.

Kinerja organisasi juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, digunakan indikator dari J. Salusu (2001:53), yang diantaranya yaitu kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal. Kapabilitas organisasi merujuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasaran atau tujuannya. Sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasaran atau tujuannya.

Faktor kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Peluang yaitu situasi dan faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai sasarannya. Sedangkan ancaman adalah faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasaran atau tujuannya. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian mempengaruhi tingkat kinerja suatu organisasi. Jadi semakin sedikit hambatan yang dihadapi suatu organisasi, maka semakin baik kinerja dari organisasi tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Perdagangan Seks Anak

Protocol to Prevent, Surpress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kegiatan

perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, ataupun penerimaan orang dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau hasil dari menerima keuntungan guna mengontrol seseorang dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut mencakup antara lain eksploitasi dalam perdagangan seks, perbudakan, kerja paksa, atau praktek sejenisnya (UNESCAP, 2005: 5). Merujuk pada *Convention on the Right of the Child*, yang termasuk dalam kategori anak dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Jadi yang dimaksud dengan perdagangan seks anak yaitu kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, ataupun penerimaan anak dibawah usia 18 tahun dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau hasil dari menerima keuntungan guna mengontrol seseorang dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.

1.6.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan suatu bentuk wadah kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009: 3).

1.6.1.3 Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi dapat diartikan sebagai pencapaian hasil atau seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran, tujuan, visi maupun misi dari organisasi tersebut (Bastian, 2001: 329).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Perdagangan Seks Anak

Perdagangan seks anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perdagangan seks yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun yang ditujukan untuk memenuhi permintaan industri pariwisata seks di Kamboja.

1.6.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT). ECPAT bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). ECPAT berusaha mendorong masyarakat luas untuk menjamin bahwa anak-anak dimanapun dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan merasa aman dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial.

1.6.2.2 Kinerja Organisasi

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja organisasi ECPAT adalah faktor kapabilitas organisasi (internal) dan faktor

lingkungan eksternal dari organisasi tersebut. ECPAT dapat dikatakan berkinerja dengan baik jika organisasi tersebut tidak memiliki hambatan baik dari segi internal maupun eksternal. Namun dikatakan kinerjanya kurang baik apabila organisasi tersebut memiliki hambatan dari segi internal atau eksternal. Lebih lanjut, organisasi dikatakan memiliki kinerja yang tidak baik jika menghadapi tantangan dari segi internal dan juga eksternal. Jadi semakin sedikit hambatan yang dihadapi organisasi, maka semakin baik kinerja dari organisasi tersebut. Berikut adalah visualisasi indikator tingkat kinerja penelitian ini.

Tabel 1.2
Visualisasi Indikator Tingkat Kinerja

Tingkat Kinerja	Indikator	
	Kapabilitas Organisasi	Lingkungan Eksternal
Baik	√	√
Kurang baik	√	×
Tidak baik	×	×

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci terkait fenomena sosial yang sedang terjadi (Suyanto & Sutinah, 2005: xiv). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya yakni kondisi atau hubungan yang ada,

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Silalahi, 2009: 201). Tipe penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menjabarkan kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak yang berkembang di Kamboja.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Dengan tujuan untuk memfokuskan permasalahan agar tidak menjadi terlalu luas dan menyimpang, maka jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, dimana status *tier* Kamboja ini fluktuatif dalam rentang tahun tersebut menurut laporan *Trafficking in Persons* dari *U.S. Departement of State*. Pemilihan jangkauan penelitian ini diambil sebagai parameter untuk mengetahui kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data atau material yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti, langsung dari subjek atau objek penelitian, atau yang bisa disebut dengan "*first-hand information*" (Silalahi, 2009: 265). Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan *interview* melalui *email* dengan Rangsima Deesawade (Ying) selaku *Regional Coordinator for Southeast Asia* ECPAT Internasional dan Debbie Hankins yang merupakan *Office Administrator* dari Agape International Missions.

Sementara itu, sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian, atau yang disebut dengan “*second-hand information*”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan/*library research* karena penelitian ini memanfaatkan sumber informasi yang terdapat dalam perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia (Silalahi, 2009: 280). Studi pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar cetak maupun online, dan bahan-bahan lainnya dari internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian tersebut, serta berbagai penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai obyek yang akan diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Uber Silalahi, 2009: 280), analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur, antara lain: (a) reduksi data yang merupakan proses di mana peneliti mengumpulkan data-data yang relevan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian; (b) tahap penyajian data yaitu mengorganisir data yang telah direduksi, kemudian di susun dalam sebuah pola hubungan sehingga

akan semakin lebih mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan penelitian selanjutnya. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data; dan (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi, alur yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan temuan, lalu melakukan verifikasi data. Puncak dari semua kegiatan analisis kualitatif terletak pada penggambaran tentang apa yang berhasil dimengerti, berhubungan dengan masalah yang di teliti. Kemudian akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang bersifat komprehensif dan mendalam (Susanto, 2006: 143).

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi ke dalam 4 (empat) bab untuk memudahkan penyusunan skripsi. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab agar pembahasan lebih mendalam dan lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri atas definisi konseptual, definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : FENOMENA KEMUNCULAN PERDAGANGAN SEKS ANAK DI KAMBOJA

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang munculnya fenomena perdagangan seks anak di Kamboja, sejarah ECPAT dan kerjasama Pemerintah Kamboja dengan ECPAT serta menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Kamboja dalam memerangi kejahatan perdagangan seks anak di Kamboja.

BAB III : KINERJA ECPAT DALAM MENANGANI PERDAGANGAN SEKS ANAK DI KAMBOJA

Berisikan tentang kasus kejahatan perdagangan seks anak di Kamboja dan penjelasan mengenai kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja, serta menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian.